



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Kota Manado

Mariani Br Waruwu^a, Johny Manaroinsong^b, Jaqueline J. Tangkau^c

^{a,b,c} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Unima Tondano, Minahasa 95618, Sulawesi Utara, Indonesia.

Email: marianiwaruwu2003@gmail.com^a, jaquelinetangkau@yahoo.co.id^c

INFO ARTIKEL

A B S T R A K

Riwayat Artikel:

Received 14-02-2026

Revised 28-03-2026

Accepted 07-03-2026

Kata Kunci:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pencegahan Kecurangan, Pengelolaan Keuangan Daerah

Keywords:

Government Internal Control System, Fraud Prevention, Regional Financial Management

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai instrumen utama mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif, Populasi penelitian seluruh pegawai BKAD Kota Manado berjumlah 36 orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (*census sampling*). Tahapan pengujian dimulai dari uji validitas dan reliabilitas data, uji normalitas data, dan Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian diperoleh SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Manado. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal sehingga tercipta tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.

A B S T R A C T

Regional financial management is a fundamental aspect in the administration of government that serves as the main instrument to support development and improve public services. This study aims to analyze the influence of the Government Internal Control System (SPIP) on the prevention of financial management fraud in the Manado City Government. The research method used is descriptive quantitative, the study population is all employees of the Manado City BKAD totaling 36 people involved in regional financial management. The sampling technique uses saturated sampling (census sampling). The testing stages begin with data validity and reliability tests, data normality tests, and the analysis technique used is simple linear regression. The results of the study obtained SPIP has a positive and significant effect on the prevention of financial management fraud in the Manado City government. The results of this study contribute to local governments in strengthening the internal control system so as to create more accountable, transparent, and fraud-free financial governance.

@2026 Mariani Br Waruwu, Johny Manaroinsong, Jaqueline Tangkau

Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Kemampuan pemerintahan dalam mengelola anggaran dan asset menjadi indikator kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pemerintahan, pengelolaan keuangan tidak sekedar menjadi urusan teknis administrative, melainkan mencerminkan komitmen pemerintah didalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan public yang berkualitas. Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi bagaimana setiap rupiah anggaran dimanfaatkan, sehingga transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan tetapi keharusan (Risakotta et al., 2023). Untuk mencapai tata kelola pemerintah yang berintegritas, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang robust guna meminimalkan resiko penyimpangan dan melindungi keuangan negara dari prktik-praktik yang merugikan (Bandiyono, 2021).

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa praktik kecurangan dalam pengelolaan anggaran daerah masih kerap ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. *Indonesian Corruption Watch* dalam laporannya tahun 2023 mencatat angka kasus *fraud* pada level pemerintahan daerah yang cukup tinggi dan menggerus kepercayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 yang mengidentifikasi total temuan senilai Rp18,19 triliun, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp7,43 triliun dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,01 triliun. Sebagian besar permasalahan tersebut bersumber dari instansi pemerintah daerah akibat kelemahan dalam mengelola keuangan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pengurusan aset daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) turut menegaskan bahwa rendahnya kualitas pengendalian internal menjadi faktor dominan penyebab maraknya korupsi di lingkungan sektor publik. Sebagai upaya preventif, Pemerintah Indonesia melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan seluruh instansi pemerintahan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai mekanisme pengawasan built-in yang berjalan berkelanjutan. SPIP merupakan proses integral yang dilaksanakan terus-menerus untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif, efisien, taat peraturan, andal, dan terlindung dari penyimpangan. SPIP dirancang dengan lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Walaupun telah diatur secara menyeluruh, penerapan SPIP di sejumlah instansi pemerintah daerah masih belum maksimal. Contoh konkret terjadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado, di mana mantan Kepala BKAD bernama JET terlibat dalam skandal korupsi pengadaan ikan kaleng untuk program bantuan sosial COVID-19 di tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp7,5 miliar dari anggaran program sebesar Rp27 miliar. Kasus ini berujung pada hukuman 10 tahun penjara (Kumparan, 2024; Lintas Perkoro, 2024). Pola penyelewengan anggaran dan

manipulasi pengadaan bantuan sosial ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP masih lemah dan berdampak langsung terhadap munculnya tindak kecurangan.

Dari perspektif regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa BKAD mempunyai fungsi strategis dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan, meliputi penyusunan anggaran daerah, pengelolaan kas, investasi daerah, serta pengurusan barang milik daerah. Kompleksitas fungsi tersebut menuntut adanya sistem pengendalian internal yang kuat, karena kelemahan pengendalian sering menjadi pemicu terjadinya kecurangan dan meningkatkan temuan audit BPK.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh implementasi SPIP terhadap efektivitas pencegahan fraud di pemerintah Kota Manado, khususnya untuk mengidentifikasi komponen mana yang paling krusial diperkuat. Konteks penelitian di instansi yang telah mengalami kasus fraud actual menjadikan temuan ini lebih aplikatif bagi Upaya perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan pemereintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian menggunakan tiga kerangka teoritis yang terintegrasi yaitu *Agency Theory*, *Internal Control Theory*, dan *Fraud Triangle Theory*. Jensen dan Meckling (1976) melalui *Agency Theory* menjelaskan bahwa pemisahan kepemilikan (Masyarakat) dan pengelolaan (BKAD) menciptakan konflik kepentingan structural yang di perkuat oleh asimetri informasi. Dalam struktur ini, agen atau pemerintah memiliki insentif dan peluang untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas amanat public atau principal.

COSO *Framework* yang mendasari *Internal Control Theory* menawarkan Solusi sistematis, melalui lima komponen terintegritas: lingkungan pengendalian yang membentuk budaya, penilaian resiko yang mengidentifikasi ancaman, aktivitas pengendalian yang menciptakan *checks and balances*, informasi dan komunikasi yang memastikan transparansi, serta pemantauan yang mengevaluasi efektivitas system. Implementasi kelima komponen ini secara simultan di BKAD Kota Manado menjadi kunci dalam menutup peluang fraud yang di jelaskan oleh *Fraud Triangel Theory* sambil mengatasi *agency problem*.

Cressey (1953) melalui *Fraud Triangle Theory* mengidentifikasi bahwa fraud terjadi Ketika tiga elemen konvergen: tekanan yang memotivasi, peluang yang memungkinkan, dan rasionalisasi yang membenarkan. SPIP menarget secara spesifik

elemen peluang dengan membangun mekanisme pengawasan yang mempersulid fraud dilakukan tanpa terdeteksi.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari lima komponen: (1) Lingkungan Pengendalian membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan etika; (2) Penilaian Risiko mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap fraud; (3) Aktivitas Pengendalian mencakup pemisahan tugas dan mekanisme otorisasi berlapis; (4) Informasi dan Komunikasi memastikan transparansi pengelolaan keuangan; (5) Pemantauan melalui fungsi audit internal untuk deteksi dini penyimpangan.

Berbagai penelitian empiris telah membuktikan adanya pengaruh positif SPIP terhadap pencegahan kecurangan. Ayem dan Kusumasari (2020) menemukan SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dengan koefisien regresi 0,445. Romney dan Steinbart (2021) memberikan pandangan yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan tidak hanya bergantung pada desain sistem itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor pendukung lainnya seperti komitmen manajemen, budaya organisasi, dan kesadaran anti-fraud dari seluruh pegawai. Hal ini mengindikasikan adanya research gap mengenai kondisi-kondisi yang membuat SPIP dapat berfungsi optimal dalam mencegah kecurangan.

Berdasarkan landasan teoritis dan bukti empiris tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

Ha: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan di BKAD Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal, untuk mengkaji hubungan sebab-akibat antara SPIP dan pencegahan kecurangan di pemerintah Kota Manado, khususnya di BKAD Kota Manado. Populasi penelitian merupakan seluruh pegawai BKAD Kota Manado yang berjumlah 36 orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat jumlah sampel yang terbatas maka seluruh pegawai di jadikan responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (*census sampling*), dimana seluruh anggota populasi dijadikan responden untuk hasil yang lengkap dan akurat.

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diukur melalui lima komponen (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi,

serta pemantauan). Variabel dependen yaitu Pencegahan Kecurangan yang diukur melalui tiga dimensi *Fraud Triangle Theory* (mengurangi tekanan (*pressure*), mengurangi peluang (*opportunity*), dan mengurangi rasionalisasi (*rationalization*)). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 yang telah divalidasi.

Analisis data meliputi Uji validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson dengan kriteria r hitung $>$ r tabel (0,329). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan kriteria nilai $>$ 0,60, uji asumsi klasik (normalitas dedngan Kolmogorov-Smirnov, linearitas, dan heteroskedastisitas dengan Glesjer) serta analisis regresi linear sederhana dengan persamaan $Y = a + bX$. Untuk memberikan analisis mendalam mengenai kontribusi masing-masing komponen SPIP, dilakukan analisis tambahan menggunakan regresi linear berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Data

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

<u>Variabel</u>	<u>Peruvataan</u>	<u>Nilai R Hitung</u>	<u>Keterangan</u>
SPIP (X)	X1.1	0,688	VALID
	X1.2	0,853	VALID
	X1.3	0,695	VALID
	X1.4	0,563	VALID
	X1.5	0,853	VALID
	X1.6	0,853	VALID
	X1.7	0,695	VALID
	X1.8	0,586	VALID
	X1.9	0,646	VALID
	X1.10	0,613	VALID
Pencegahan Fraud (Y)	Y1.1	0,659	VALID
	Y1.2	0,659	VALID
	Y1.3	0,736	VALID
	Y1.4	0,474	VALID
	Y1.5	0,674	VALID
	Y1.6	0,785	VALID
	Y1.7	0,591	VALID
	Y1.8	0,548	VALID
	Y1.9	0,773	VALID
	Y1.10	0,856	VALID

Sumber: Data Diolah 2025 menggunakan SPSS 27

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pernyataan untuk variabel SPIP (X) dan Pencegahan Kecurangan (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel (0,329).

Uji Reliabilitas Data

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keputusan
1	SPIP (X)	0,885	Reliabel
2	Pencegahan Fraud (Y)	0,904	Reliabel

Sumber: Data Diolah 2025 menggunakan SPSS 27

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk variabel SPIP sebesar 0,906 dan variabel Pencegahan Kecurangan sebesar 0,798, yang berarti kedua variabel reliabel ($> 0,60$).

Uji Normalitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

Keterangan	Unstandardized Residual
N	36
Test Statistic	0,101
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Diolah 2025 menggunakan SPSS 27

Hasil uji normalitas data menunjukkan data telah berdistribusi normal dengan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 ($> 0,05$). Uji linearitas menunjukkan terdapat hubungan linear antara SPIP dan Pencegahan Kecurangan dengan nilai signifikansi linearity $< 0,05$. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi $> 0,05$.

Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	6,740	5,242	1,286	0,207
SPIP	0,658	0,157	4,181	0,000

Sumber: Data Diolah 2025 menggunakan SPSS 27

Berdasarkan pada hasil tabel 4 diatas, maka persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = 6,740 + 0,658X$$

Hasil analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan: $Y = 10,571 + 0,617X$. Nilai konstanta 10,571 menunjukkan bahwa jika SPIP bernilai nol, maka pencegahan kecurangan akan bernilai 10,571. Koefisien regresi 0,617 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan SPIP akan meningkatkan pencegahan kecurangan sebesar 0,617 satuan.

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung = 3,797 $>$ t tabel = 2,032 dengan nilai signifikansi 0,001 $<$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima,

yang berarti SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan di BKAD Kota Manado.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Kesimpulan
SPIP → Pencegahan Fraud	4,181	2,032	0,000	H ₁ Diterima

Sumber: Data Diolah 2025 menggunakan SPSS 27

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (t hitung > t tabel dan Sig. < 0,05).

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien korelasi menghasilkan nilai $r = 0,548$, yang menunjukkan hubungan positif sedang antara SPIP dan pencegahan kecurangan. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,300 menunjukkan bahwa SPIP mampu menjelaskan 30% variasi dalam pencegahan kecurangan, sedangkan 70% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
0,583	0,340	0,320	6,230

Sumber: Data Diolah 2025 menggunakan SPSS 27

Hasil analisis tambahan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa dari kelima komponen SPIP, komponen yang paling dominan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan adalah Aktivitas Pengendalian, diikuti oleh Lingkungan Pengendalian dan Pemantauan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prosedur pengendalian yang ketat, pemisahan tugas yang jelas, dan sistem otorisasi yang berlapis menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan *Fraud Triangle Theory* yang menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya peluang (*opportunity*). SPIP berfungsi menutup celah peluang tersebut melalui penguatan struktur pengendalian internal. Dari perspektif *Agency Theory*, temuan ini mengonfirmasi bahwa SPIP efektif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mengurangi *agency problem* antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah Kota Manado sebagai agen.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ayem dan Kusumasari (2020), Ariastini et al. (2020), dan Nur'aini dan Arismutia (2024) yang menemukan pengaruh positif signifikan SPIP terhadap pencegahan fraud di berbagai konteks sektor publik

Indonesia. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya BKAD Kota Manado untuk terus memperkuat implementasi SPIP, khususnya pada komponen aktivitas pengendalian, untuk meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan di BKAD Kota Manado. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung = 3,797 > t tabel = 2,032 dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Koefisien korelasi sebesar 0,548 menunjukkan hubungan positif sedang antara SPIP dan pencegahan kecurangan. Kelima komponen SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan) terbukti efektif dalam mencegah fraud, dengan komponen aktivitas pengendalian sebagai faktor paling dominan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada satu instansi yaitu BKAD Kota Manado, sehingga generalisasi hasil ke instansi pemerintah daerah lainnya perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan metode survei melalui kuesioner yang mengandalkan persepsi responden, sehingga kemungkinan terdapat bias dalam jawaban. Ketiga, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 30% menunjukkan masih terdapat 70% faktor lain yang mempengaruhi pencegahan kecurangan yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, peneliti memberikan beberapa saran. Bagi BKAD Kota Manado, disarankan untuk memperkuat implementasi SPIP terutama pada komponen aktivitas pengendalian melalui pemisahan tugas yang lebih ketat, sistem otorisasi berlapis, dan dokumentasi yang komprehensif. Perlu juga meningkatkan fungsi pemantauan melalui audit internal yang lebih intensif dan tindak lanjut temuan audit yang konsisten. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian ke beberapa instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan generalisasi hasil. Selain itu, dapat menambahkan variabel lain seperti budaya organisasi, kompetensi SDM, dan whistleblowing system yang juga berkontribusi terhadap pencegahan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). *Report to the Nations: 2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, TX: ACFE.
- Ayem, S., & Kusumasari, R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 17(1): 45-62.
- Bandiyono, A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, dan Moralitas Aparat terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 321-340.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Cressey, D. R. (1973). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Montclair, NJ: Patterson Smith.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2023). *Outlook Korupsi 2023: Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Jakarta: ICW.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan KPK 2022: Mengawal Integritas, Membangun Negeri*. Jakarta: KPK.
- Kumparan. (2024). Mantan Kepala BKAD Manado Divonis 10 Tahun Penjara Kasus Korupsi Bansos. Diakses dari <https://kumparan.com> pada 15 Januari 2026.
- Lintas, P. (2024). Korupsi Bansos COVID-19 di Manado Rugikan Negara Rp7,5 Miliar. Diakses dari <https://lintasperkoro.com> pada 15 Januari 2026.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Risakotta, Y. M., Tinangon, J. J., & Pusung, R. J. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Keuangan Daerah. *Jurnal EMBA* 11(1): 234-245.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems. Edisi ke-15*. London: Pearson Education.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.